



PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUMI PERKEMAHAN JURANG SENGGANI TULUNGAGUNG

Dian Agung Pratama^{1*}, Uswatun Nafi'ah²

¹Mahasiswa Jurusan Pariwisata Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

²Dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Email: dianagungpratama12@gmail.com



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani menjadi salah satu fokus pengembangan ekowisata berbasis masyarakat seperti pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 Tulungagung, kawasan Sendang merupakan kawasan strategi pariwisata 1 Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya. Namun dalam beberapa waktu terakhir kondisi partisipasi pada objek wisata tersebut menurun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata, faktor pendukung dan penghambat, serta konsep pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam setiap tahap mulai tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, serta evaluasi dengan tipe partisipasi konsultatif, partisipasi fungsional, partisipasi insentif, dan partisipasi mandiri. Bentuk partisipasi masyarakat berupa ide, tenaga dan keterampilan. Faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat yaitu sulitnya akses, keterbatasan anggota, kurangnya kesiapan SDM terkait IT, dan keterbatasan dana. Hal tersebut berdampak pada kejelasan struktur kelembagaan Pokdarwis, kegiatan promosi, dan pemeliharaan fasilitas sehingga belum mencapai keteraturan layanan dan keteraturan infrastruktur. Faktor pendukung yaitu kerja sama yang tinggi, kerja sama dengan berbagai pihak, daya tarik alam luar biasa, serta keterampilan masyarakat dalam memainkan budaya lokal. Konsep pengembangan dan pengelolaan berbasis masyarakat yang diterapkan dengan baik yaitu dimensi ekonomi, dimensi budaya, dan dimensi lingkungan. Namun dimensi sosial dan dimensi politik masih lemah. Dalam pengelolaan objek wisata ini menggunakan prinsip sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pariwisata Berbasis Masyarakat; Pengembangan dan Pengelolaan Wisata.

Abstract: *The Jurang Senggani Camping Ground tourist attraction is one of the focuses of community-based ecotourism development as stated in Regional Regulation No. 2 of 2017 Tulungagung, the Sendang area is a tourism strategy area for 1 Foot of Mount Wilis and its surroundings. However, in recent times the condition of participation in this tourist attraction has decreased. The aim of this research is to examine the role of community participation in the development and management of tourist attractions, supporting and inhibiting factors, as well as the concept of community-based tourism development and management. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this research are that the community has been involved in every stage starting from decision making, implementation, benefit taking and evaluation with the types of consultative participation, functional participation, incentive participation and independent participation. Forms of community participation are in the form of ideas, energy and skills. Factors inhibiting and supporting community participation include difficulty of access, limited members, lack of human resource readiness related to IT, and limited funds. This has an impact on the clarity of the Pokdarwis institutional structure, promotional activities and facility maintenance so that service regularity and infrastructure regularity have not yet been achieved. Supporting factors are high cooperation, cooperation with various parties, extraordinary natural attractions, and community skills in playing with local culture. The concept of community-based development and management that is well implemented is the economic dimension, cultural dimension and environmental dimension. However, the social and political dimensions are still weak. In managing this tourist attraction, the Sapta Pesona principle is used, namely safe, orderly, clean, cool, beautiful, friendly and memorable.*

Keywords: *Community Participation; Community Based Tourism; Tourism Development and Management.*

PENDAHULUAN

Pariwisata memainkan peran penting dalam meningkatkan devisa suatu negara maupun dalam pendapatan daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah serta keanekaragaman budaya yang menjadikan wilayah Indonesia mempunyai potensi yang tersebar luas baik berupa keindahan alam, budaya, tempat bersejarah, acara kebudayaan, serta tempat hiburan (El Lagarensen et al., 2023). Selain dicanangkan sebagai salah satu sumber penghasilan daerah maupun negara, sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Saat ini sektor pariwisata telah menjadi sektor unggulan bagi perekonomian Indonesia dan telah ditetapkan sebagai bisnis unggulan nasional yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi seperti membuka peluang usaha hulu-hilir kegiatan pariwisata (Irfani, Mohammad & Satlita, 2024).

Pengertian pariwisata secara etimologi berasal dari dua kata yaitu “Pari” yang berarti banyak atau berkeliling, sedangkan pengertian “wisata” berarti perjalanan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain. Perjalanan tersebut dilakukan dengan meninggalkan tempat semula, bukan maksud mencari nafkah di tempat yang di kunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan bertamasya atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam (El Lagarensse et al. 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata (El Lagarensse et al., 2023).

Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat. Adanya program pemberdayaan karena masyarakat memiliki hal untuk berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Selain itu, masyarakat setempat juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan daya tarik wisata serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya usaha-usaha kecil sampai menengah seperti penginapan, rumah makan atau warung makan, oleh-oleh tempat wisata, penyewaan peralatan penunjang pariwisata, dan masih banyak lagi usaha lainnya yang mampu memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat (Irfani, Mohammad & Satlita, 2024).

Pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah *community-based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat

adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sarudin menyebutkan bahwa masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (*host*), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya (Sunaryo, 2023). Sarudin menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas (Sunaryo, 2023).

Tulungagung merupakan kabupaten dengan berbagai potensi baik potensi alam maupun potensi budaya yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata mulai dari pantai hingga kawasan pegunungan di area Lingkar Wilis. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung 2017-2027, menyebutkan bahwa kawasan Sendang merupakan kawasan strategi pariwisata yang disebutkan pada pasal 15 ayat (2) Kawasan Strategis Pariwisata I Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya. Dalam hal ini objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani menjadi salah satu objek wisata dengan kategori kawasan strategis pariwisata seperti pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017, menjadi kawasan strategi pariwisata satu yang ditujukan di kawasan kaki Gunung Wilis yaitu area Sendang dan sekitarnya dengan fokus pengembangan ekowisata berbasis masyarakat sesuai dengan Pasal (15) ayat 2, Kawasan Strategis Pariwisata I Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk pengembangan ekowisata alam pegunungan, dengan obyek wisata berupa penginapan, desa wisata, *outbond*, tempat *retreat*, pesanggrahan dan sejenisnya.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Tulungagung 2017-2022

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Domestik	Mancanegara	
2017	729.060	2.192	731.252
2018	1.250.702	69	1.250.771
2019	1.503.008	217	1.503.225
2020	1.233.475	3	1.233.478
2021	528.926	22	528.948
2022	1.713.670	95	1.713.765

(BPS Kabupaten Tulungagung, 2024)

Objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani merupakan objek wisata alam yang berada di area lingkaran Gunung Wilis dengan suasana dan panorama alam yang luar biasa. Objek wisata ini merupakan objek wisata dengan kawasan hutan pinus yang diduduki udara dingin dan bersih sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selanjutnya objek wisata ini memiliki daya tarik lain yaitu berupa Air Terjun Jurang Senggani yang memiliki jarak kurang lebih sekitar 4 kilometer dari kawasan Bumi Perkemahan. Selain kondisi alam objek wisata ini memiliki daya tarik lain yaitu berupa sosial budaya masyarakat dimana masyarakat Desa Nglurup masih melestarikan tradisi dan budaya setempat. Selanjutnya keramahan serta mata pencarian masyarakat lokal Desa Nglurup sebagai petani dan peternak menjadi keunikan daya tarik tersendiri yang dapat dibagikan kepada wisatawan. Objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani resmi dibuka pada tahun 2017 dan dikelola oleh masyarakat lokal dengan dibentuknya Pokdarwis Jurang Senggani. Pokdarwis sendiri merupakan kelembagaan sadar wisata yang berada di tingkat desa dengan beranggotakan masyarakat setempat. Pokdarwis berperan sebagai motivator, komunikator, serta penggerak dalam upaya meningkatkan kesiapan serta kesadaran masyarakat terhadap objek wisata atau daya tarik wisata. Dalam hal ini Pokdarwis berperan untuk memaksimalkan potensi lokal guna menarik minat kunjungan wisatawan.

Dalam pengembangan objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani masih memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani semula dirintis karena inisiatif masyarakat Dusun Jambuwok agar wilayahnya dapat dikenal oleh masyarakat luas namun dalam beberapa waktu terakhir kondisi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan objek wisata ini menurun. Dalam hal ini bisa dilihat dari anggota Pokdarwis yang semakin berkurang. Kendala selanjutnya adalah kurangnya sarana prasarana pariwisata serta akses jalan menuju objek wisata tersebut cukup sulit sehingga sering kali menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung. Selain itu minat kunjungan wisatawan pada objek wisata tersebut menurun dimana pada tahun 2019 objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani mampu menarik kunjungan wisatawan sebanyak 41.354 (Febrianti, 2021).

Namun pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan pada objek tersebut hanya mampu mencapai rata-rata 400-600 wisatawan dalam satu bulan. Kondisi tersebut terjadi akibat dari kurangnya partisipasi serta ekonomi yang belum pulih semenjak pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji konsep pengembangan pariwisata berbasis

masyarakat yang sudah di terapkan melalui tahap dan tipe partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat serta dimensi pariwisata berbasis masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Suaib, 2023). Partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi (Hajar et al., 2018).

Cohen dan Uphoff dalam Suaib (2023) membagi bentuk partisipasi ke beberapa tahapan diantaranya:

1. Tahap pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dari masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tenaga sebagai anggota proyek.
3. Tahap pengambilan manfaat tahap pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari kuantitas dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Tahap evaluasi merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek. Selanjutnya Hobley dalam Hajar et al., (2018) membagi tipe partisipasi 7 tahapan diantaranya partisipasi pasif, partisipasi informatif, partisipasi konsultatif, partisipasi, partisipasi insentif, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, partisipasi mandiri (*self mobilization*.)

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Comity Based Tourism*)

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep pengembangan dan pengelolaan pariwisata berada dalam kontrol masyarakat lokal, dalam hal ini bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan tersebut (Arida, 2016). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep pengembangan dan pengelolaan pariwisata berada dalam kontrol masyarakat lokal, dalam hal ini bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan tersebut. Suansri mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) merupakan pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan (Suansri, 2003).

Adapun dimensi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menurut (Suansri, 2003):

1. Ekonomi: adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, tumbuhnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata, *joint venture* dalam usaha pariwisata di mana dari keuntungan yang diperoleh wajib menyisihkan keuntungan bagi komunitas (berupa CSR atau dana bagi hasil).
2. Sosial: mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek, mengembangkan kebanggaan komunitas, mengembangkan kualitas hidup komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.
3. Budaya: adanya upaya menghargai budaya lokal *heritage* dan tradisi dalam kegiatan pariwisata, mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia.
4. Lingkungan: *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah serta meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi, berkelanjutan secara ekologis lingkungan tidak boleh berkurang nilainya.
5. Politik: peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.

Pengelolaan Sektor Wisata

Pengelolaan suatu kawasan wisata merupakan hal yang penting dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dimana strategi pengelolaan suatu kawasan seharusnya ditentukan dengan matang sebelumnya sehingga tujuan dapat dicapai. Salah satu konsep pengelolaan pariwisata yang digalakkan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan sapta pesona pariwisata diantaranya aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan (Rahim, 2012).

1. Aman: suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
2. Tertib: suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien.
3. Bersih: suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/higienis
4. Sejuk: suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh.
5. Indah: suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik.
6. Ramah: suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi.
7. Kenangan: suatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Penelitian Terdahulu

Menurut Penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Serang Di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar menunjukkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pemanfaatan hasil. Faktor pendukung berupa kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan pariwisata, sedangkan faktor penghambat yaitu usia, jenis kelamin, rendahnya pendidikan, pekerjaan dan kurangnya dana (Irfani, Mohammad & Satlita, 2024).

Selanjutnya penelitian dengan judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani di Desa Nglurup Kecamatan Sendang* menunjukkan partisipasi masyarakat cukup bagus dengan tipe partisipasi konsultatif yaitu ide dan gagasan pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi insentif berupa tenaga dan harta dan partisipasi interaktif dengan ikut serta dalam studi banding. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama, Bertindak bersama serta partisipasi self mobilization (mandiri), berupa ketrampilan dan kemahiran dengan membuka usaha layanan pariwisata (Febrianti, 2020).

Selanjutnya penelitian dengan judul *Kajian Dimensi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Penelitian ini menunjukkan dimensi CBT Desa Wisata Sumber bulu yaitu Dimensi ekonomi berupa adanya dana pengembangan, terciptanya lapangan kerja, tumbuhnya pendapatan dan adanya joint venture. Dimensi sosial berupa keterlibatan anggota dalam setiap aspek, pengembangan kebanggaan komunitas, pengembangan kualitas hidup dan pembagian peran yang adil, penguatan organisasi, otorisasi komunitas. Dimensi budaya berupa upaya menghargai dan mempertahankan keunikan budaya, membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia. Dimensi lingkungan berupa carrying capacity area, menjamin keberlanjutan lingkungan. Dimensi politik berupa konsolidasi kelembagaan, peningkatan partisipasi, menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam (Arum, Padmaningrum & Winarno, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya (Fantika, et al. 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani Tulungagung sudah dijalankan, mengetahui faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sumber data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder melalui catatan dokumen, studi literatur, dan media cetak (Moleong, 2017). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap relevan diantaranya masyarakat di sekitar objek wisata, anggota Pokdarwis serta *key-informan* dalam penelitian ini adalah ketua Pokdarwis Desa Nglurup. Data yang di peroleh

nantinya akan di analisis menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu dengan redukasi data, penyajian data kemudian di tarik kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa berupa kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Choen Uphof dalam Suaib, 2023).

Dalam hal ini masyarakat Desa Nglurup tidak lepas dari keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dimana objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani terbentuk karena adanya inisiatif dari masyarakat Desa Nglurup dimana masyarakat yang memiliki keinginan agar wilayahnya dapat di kenal oleh masyarakat luas mulai merintis akses ke air terjun karena sebelumnya kawasan tersebut belum bisa diakses oleh wisatawan dan dilanjutkan dengan pembersihan pada kawasan objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani. Selanjutnya beberapa pemuda karang taruna dan tokoh masyarakat memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena sebelumnya tanah tersebut sudah di kelola masyarakat sebagai tanah pesanggem. Keputusan yang sudah di setuju dan di dukung oleh masyarakat kemudian di ajukan kepada pihak Perhutani bersama LMDH. Pada tahun 2017 di bentuklah (PKS) perjanjian kerja sama antara Desa, Perhutani, Pemerintah Daerah dan dibentuklah anggota Pokdarwis yang anggotanya masyarakat Desa Nglurup sendiri. Selain itu dalam setiap program atau event tertentu pihak-pihak terkait selalu berkomunikasi kepada seluruh anggota dan masyarakat setempat. Hal tersebut diwujudkan melalui musyawarah guna masyarakat menyampaikan ide, dan gagasan mereka secara langsung.

Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Dalam tahap ini bentuk partisipasi digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, materi, dan tenaga sebagai anggota proyek (Choen Uphof dalam Suaib, 2023). Masyarakat Desa Nglurup terlibat aktif dalam tahapan ini dimana dalam hal ini diwujudkan dengan di bentuknya kelembagaan Pokdarwis yang berisikan masyarakat setempat. Selain itu masyarakat sekitar objek wisata terlibat aktif dari

berbagai program atau event tertentu baik yang diadakan pihak Pokdarwis maupun instansi atau komunitas yang melalui pihak Pokdarwis. Seperti event kebudayaan, piket bersama guna pemeliharaan objek wisata, serta program dari luar Pokdarwis seperti tanam pohon, perbaikan jalan, festival musik dan program atau kegiatan event lainnya.



Gambar 1. Event Kebudayaan (Akun Instagram seputar Sendang, 2024)



Gambar 2. Event Kebudayaan Desa Nglurup (Dokumenetasi Peneliti, 2024)

Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat berupa ide, tenaga, dan keterampilan dimana dalam hal ini ide di wujudkan dalam memberikan kritik dan masukan, tenaga diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan serta keterampilan diwujudkan dengan menambah berbagai spot foto.



Gambar 3. Festival Musik Sendang Jazz (Akun Instagram Seputar Sendang, 2024)



Gambar 4. Proses Pembuatan Panggung (Dokumentasi Peneliti, 2024)

Tahap Pengambilan Manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai (Choen Uphof dalam Suaib, 2023). Keterlibatan masyarakat Desa

Nglurup dalam pemanfaatan hasil cukup baik. Hal tersebut diwujudkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi pemuda desa Nglurup untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata Bumi perkemahan Jurang Senggani. Selanjutnya dengan adanya objek tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dimana masyarakat bisa melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti menyediakan sarana dan prasarana pariwisata diantaranya menyediakan toilet, warung makan, menyediakan lahan parkir, serta menyediakan jasa catering bila ada sebuah event tertentu.



Gambar 5. Warung Makan Masyarakat Sekitar Objek Wisata (Dokumentasi Peneliti, 2024)

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi sudah cukup baik. Hal tersebut diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat setempat dalam memberikan kritik dan saran kepada pihak pengelola dengan langsung menuju kesekretariatan dan keterbukaan pihak pengelola terhadap kritik dan saran dari masyarakat setempat. Selanjutnya pihak pengelola rutin melakukan evaluasi kecil pada setiap minggu guna mengevaluasi kegiatan selama seminggu serta merumuskan berbagai masukan baik dari masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung guna menjadi bahan evaluasi kepada dinas pariwisata yang rutin diadakan setiap bulan.

Tipe Partisipasi Masyarakat

Hobley mengidentifikasi adanya tujuh tingkatan partisipasi sebagai berikut: Partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi informatif, partisipasi konsultatif, partisipasi insentif, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif dan *Self Mobilization*/ partisipasi mandiri (Hajar et al., 2018). Tipe partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani dikategorikan sebagai tipe partisipasi konsultatif. Hobley menjelaskan bahwa partisipasi konsultatif merupakan partisipasi dengan cara berkonsultasi orang luar untuk mendengarkan, menganalisis masalah, dan pemecahannya serta masyarakat sebagai masukan

guna di tindak lanjuti oleh pihak luar (Hajar et al. 2018). Dalam hal ini objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani terbentuk karena adanya inisiatif dari masyarakat setempat yang kemudian bersama LMDH di ajukan ke Perhutani dan di bentuklah kelembagaan Pokdarwis dan PKS (perjanjian kerja sama) antara masyarakat Desa, Perhutani dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini tugas pokok fungsi masyarakat adalah sebagai pengelola dan pemelihara objek tersebut serta sebagai masukan guna ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat. Selanjutnya adalah partisipasi fungsional dalam hal ini masyarakat di buatkan kelembagaan Pokdarwis guna mengelola dan menjalankan operasional objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani. Selanjutnya partisipasi insentif. Hobley menjelaskan bahwa partisipasi insentif merupakan keterlibatan masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah (Hajar et al., 2018). Dimana dalam hal ini pihak pengelola sering melibatkan masyarakat sekitar untuk menjadi buruh harian guna mempersiapkan agenda event tertentu. Partisipasi selanjutnya adalah partisipasi mandiri dimana masyarakat lokal bebas memanfaatkan sumber daya yaitu dengan melakukan kegiatan usaha di sekitar objek wisata seperti membuka berbagai usaha warung makan.

Faktor Penghambat

Objek wisata Bumi perkemahan Jurang Senggani merupakan objek wisata dengan kepemilikan komunitas lokal. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala sehingga menjadi penghambat dalam proses operasional dan pengembangan objek wisata ini. Adapun beberapa faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya kesiapan SDM dan keterbatasan anggota. Hal tersebut menyebabkan ke tidak jelasan struktur kelembagaan Pokdarwis, penanggung jawab, serta *Job desc* dari masing-masing anggota.

Hal tersebut berdampak pada operasional objek wisata ini seperti sarana dan prasarana pariwisata yang tidak dioperasikan secara optimal diantaranya *flying fox*, dan beberapa warung makan.

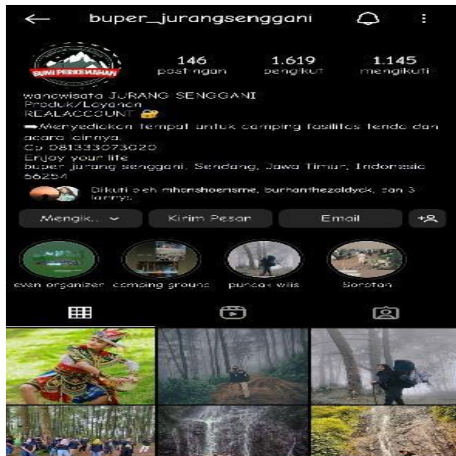


Gambar 6. Warung Makan yang Tidak digunakan (Dokumentasi Peneliti, 2024)



Gambar 7. Wahan Flying Fox yang Tidak di Gunakan (Dokumentasi Peneliti, 2024)

Selain itu keterbatasan anggota serta kurang kesiapan SDM juga berdampak pada kegiatan promosi dimana dalam hal ini akun sosial media Instagram Pokdarwis belum berjalan secara konsisten.



Gambar 8. Akun Sosial Media Pokdarwis (Dokumen Pokdarwis Desa Nglurup, 2024)



Gambar 9. Akun Media Sosial Pokdarwis (Dokumen Pokdarwis Desa Nglurup, 2024)

Kendala selanjutnya adalah keterbatasan dana sehingga berdampak pada pemeliharaan fasilitas dan pengembangan infrastruktur serta sulitnya akses dimana akses jalan kurang lebih sekitar 200 m dari pintu masuk ke objek wisata sering kali menjadi menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung.



Gambar 10. Gambar Akses Jalan yang Rusak (Dokumentasi Peneliti, 2024)



Gambar 11. Gambar Akses Jalan Rusak (Dokumentasi Peneliti, 2024)

Faktor Pendukung

Deviyanti berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program diantaranya Kemauan Kemampuan dan Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Siti Hajar, et. al., 2023) . Selain beberapa faktor penghambat diatas adapun faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata ini diantaranya kerja sama antara anggota Pokdarwis dan masyarakat sekitar objek wisata yang tinggi dimana setiap anggota komunitas selalu memberikan mentoring dan membantu tugas (*Job desc*) dari anggota lain. Selian itu masyarakat di sekitar objek wisata yang selalu antusias dalam mengikuti program yang ada. Faktor pendukung selanjutnya adalah daya tarik yang luar

biasa dimana objek wisata ini merupakan ekowisata dengan keindahan alam dan suasana khas pegunungan selain itu masyarakat yang memiliki ketrampilan dalam melakukan seni budaya. Faktor pendukung yang terakhir adalah sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak diantaranya Desa, Pemerintah Daerah, dan Perhutani.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Konsep Pengembangan Dan Pengelolaan Objek Wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) merupakan pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya (Suansri, 2003). CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Ada 5 dimensi dari pariwisata berbasis masyarakat diantaranya dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi lingkungan, dan dimensi politik (Suansri, 2003). Menurut Hadiwijoyo konsep CBT *community based tourism* mempunyai prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai *tool of community development* bagi masyarakat lokal yaitu mengakui mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat, melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek, meningkatkan kualitas hidup, menjamin sustanbilitas lingkungan, memelihara karakter dan budaya lokal yang unik, mendistribusikan keuntungan secara adil diantara anggota masyarakat (Satrio & Sabana, 2018).

Dalam dimensi ekonomi ada beberapa indikator diantaranya adanya pendanaan untuk komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, tumbuhnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata, serta *joint venture* dalam usaha pariwisata dimana dari keuntungan yang diperoleh wajib menyisihkan keuntungan bagi komunitas berupa CSR atau dana bagi hasil (Suansri, 2003). Dalam hal ini dimensi ekonomi yang sudah di terapkan dalam pengembangan objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani diantaranya adanya pendanaan secara berkala dari Dinas Pariwisata, mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi pemuda Desa Nglurup, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dimana masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi di sekitar objek wisata seperti membuka usaha warung makan penyedia parkir serta membuka jasa katering ketika ada sebuah event. Selanjutnya *joint venture* sudah dijalankan dengan pihak-pihak terkait dimana sesuai perjanjian kerjasama pembagian hasil dibagi menjadi 3 yaitu Perhutani 30%, Dinas Pariwisata 20%, serta masyarakat 50%.



Gambar 12. Sosialisasi Pendanaan
(Dokumentasi Peneliti, 2024)

Ada beberapa indikator dalam dimensi sosial diantaranya mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek, mengembangkan kebanggaan komunitas, mengembangkan kualitas hidup komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi (Suansri, 2003). Dalam dimensi ini pihak pengelola sudah melibatkan seluruh anggota komunitas dan masyarakat sekitar objek wisata dalam setiap aspek baik dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan, pemanfaatan hasil hingga evaluasi. Hal tersebut diwujudkan dengan keterlibatan seluruh anggota dan masyarakat sekitar objek wisata dalam kegiatan musyawarah guna menyampaikan ide dan gagasannya secara langsung, mengikuti program atau event, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi serta keterlibatan dalam pemberian kritik dan saran dalam proses evaluasi. Selanjutnya dengan adanya objek ini mampu membanggakan komunitas lokal dimana dalam hal ini wilayah desa Nglurup yang sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat luas kini dapat dikenal oleh masyarakat dari berbagai daerah serta masyarakat memiliki rasa bangga terhadap tradisi, budaya, dan kearifan lokal dimana dalam hal ini masyarakat antusias turut serta dalam event kebudayaan. Selanjutnya pembagian peran yang adil sudah dijalankan dimana seluruh anggota komunitas dan masyarakat Desa Nglurup memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Namun terkait dengan indikator meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal masih kurang. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang memilih untuk pindah ke sektor lain yang di sebabkan karena belum tercapainya kesejahteraan dimana dalam hal ini terjadi akibat dari rendahnya pendapatan pada sektor ini, serta membangun penguatan organisasi komunitas belum tercapai dalam hal ini bisa dilihat dari belum adanya struktur yang jelas terkait dengan kelembagaan Pokdarwis.

Ada beberapa indikator dalam dimensi budaya diantaranya, adanya upaya menghargai budaya lokal, heritage dan tradisi dalam kegiatan pariwisata, mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia (Suansri, 2003).

Dalam upaya menghargai budaya lokal pihak pengelola selalu bergandeng tangan dengan budayawan Desa Nglurup karena mayoritas dari pengelola sendiri adalah pemeran dari kebudayaan tersebut. Selanjutnya event kebudayaan rutin di selenggarakan pada hari-hari tertentu seperti tahun baru Suro dan Agustus yang di perankan langsung oleh masyarakat lokal. Adapun budaya yang ada di Desa Nglurup seperti nguri-nguri budaya, tari malurup, dan jaranan reog. Selain seni budaya masyarakat lokal masih memiliki makanan khas yang di jual pada event-event seperti nasi tiwul, nasi jagung, botok, sayur pakesaji serta kopi sendang. Hal tersebut dilakukan guna melestarikan dan mengenalkan budaya lokal kepada wisatawan sehingga terjadi interaksi pertukaran budaya dan saling menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia.

Adapun beberapa indikator dalam dimensi lingkungan diantaranya *carrying capacity area*, pengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi, berkelanjutan secara ekologis lingkungan tidak boleh berkurang nilainya (Suansri, 2003). Objek wisata bumi perkemahan jurang senggani merupakan objek dengan ikon bumi perkemahan yang di dominasi kunjungan wisatawan dari lembaga atau komunitas. Dalam hal ini objek wisata tersebut mampu menampung kunjungan sebanyak 10.000 wisatawan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan pihak pengelola selalu memberikan himbauan kepada wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, tanaman, dan mengambil sadap pinus milik warga setempat. Selain itu program piket bersama rutin dilakukan setiap satu minggu dan sebelum atau sesudah ada event. Tidak jarang Program tanam pohon sering diadakan pada objek wisata ini baik dari pihak Pokdarwis sendiri maupun dari komunitas atau instansi luar yang melalui perantara Pokdarwis.

Dimensi Politik menurut Suansri ada beberapa indikator dalam dimensi ini diantaranya, peningkatan kekuasaan komunitas lokal, peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA. Dalam dimensi ini adapun indikator yang sudah diterapkan diantaranya peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas dimana operasional objek wisata ini diatur melalui PKS (Perjanjian Kerja sama) dengan 3 peran pemangku kepentingan diantaranya Pokdarwis, Dinas Pariwisata, dan Perhutani. Adapun fungsi dari 3 pemangku kepentingan tersebut diantaranya Pokdarwis sebagai pengelola, Perhutani sebagai pemilik lahan serta Dinas Pariwisata sebagai Pengembang. Dalam hal ini kelembagaan Pokdarwis menjadi mita pemerintah serta keberadaan objek wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani telah di akui oleh semua pihak. Selanjutnya menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA dimana dalam hal ini Pokdarwis bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan pariwisata dimana masyarakat dan pokdarwis terlibat dalam

proses pengambilan keputusan guna mengelola dan mengambil manfaat dari adanya sumber daya yang ada. Selanjutnya masyarakat sekitar objek wisata menjadi prioritas dalam proses pengambilan manfaat dimana masyarakat lokal bisa melakukan kegiatan ekonomi di sekitar objek wisata tanpa dikanankan biaya tarif sewa ruko sedangkan masyarakat yang berada di luar objek wisata dikenakan tarif untuk biaya sewa ruko. Namun untuk indikator peningkatan partisipasi masih lemah dimana objek wisata jurang senggani terbentuk karena adanya inisiatif masyarakat namun kondisi partisipasi saat ini menurun dimana dalam hal ini bisa dilihat dari keterbatasan anggota Pokdarwis.

Pengelolaan Objek Wisata Bumi Perkemahan Jurang Senggani

Pengelolaan suatu kawasan wisata merupakan hal yang penting dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pengelolaan suatu kawasan seharusnya ditentukan dengan matang sebelumnya sehingga tujuan dapat dicapai. Salah satu konsep pengelolaan pariwisata yang digalakkan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan sapta pesona pariwisata diantaranya aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan (Rahim, 2012).



**Gambar 13. Motto Pengelola
dengan Sapta Pesona** (Dokumentasi
Peneliti, 2024)

Objek wisata Jurang Senggani merupakan objek wisata yang dikelola oleh komunitas lokal dengan prinsip sapta pesona. Aman, adapun upaya pengelola dalam menerapkan prinsip tersebut diantaranya siap siaga selama 24 jam, memberikan kontak pengelola serta berkolaborasi dengan pihak keamanan di area Sendang ketika mengadakan event yang bersifat ramai guna memberikan rasa aman kepada wisatawan. Namun dalam hal ini masih terhambat oleh keterbatasan anggota sehingga berdampak pada penanggung jawab piket keamanan.

Selanjutnya tertib dalam upaya mengatur ketertiban pihak pengelola selalu memberi himbauan kepada wisatawan untuk tidak melanggar nilai-nilai masyarakat setempat seperti himbauan untuk tidak merusak lingkungan, merusak tanaman, dan mengambil sadap pinus

milik masyarakat setempat serta mengatur jadwal event *outbont*, reservasi tempat dan fasilitas camping. namun dalam hal ini masih terhambat dengan sulitnya akses, fasilitas yang sudah usang, warung makan yang tidak digunakan, beberapa wahana yang tidak dioperasikan serta belum konsisten penggunaan sosial media. hal tersebut berdampak pada keteraturan infrastruktur dan layanan pariwisata dimana dalam hal ini membuat wisatawan sulit mengakses pengelola guna melakukan reservasi tempat ataupun peralatan *outbond*.

Selanjutnya bersih dimana upaya pengelola adalah rutin melakukan piket bersama sebelum dan sesudah event serta piket bersama yang diselenggarakan pada setiap minggu. Sejuk dan indah dimana upaya pengelola dalam hal ini adalah mengadakan program tanam pohon dan tanaman hias guna menjaga kelestarian lingkungan serta membuat spot-spot foto dalam upaya memberikan keindahan. namun dalam hal ini masih terhambat oleh beberapa fasilitas yang sudah usang sehingga berdampak pada estetika objek wisata.



Gambar 14. Kegiatan Bersih Objek Wisata
(Dokumentasi Peneliti, 2024)

Selanjutnya adalah keramahtamahan dimana upaya pengelola dalam hal ini selalu memberikan senyuman dan sapaan kepada wisatawan yang berkunjung serta pelayanan yang prima. Dalam hal ini dilakukan pihak pengelola guna memberikan keramahtamahan sekaligus memberikan kenangan kepada wisatawan karena untuk souvenir sendiri hanya ada pada event-event tertentu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini masyarakat sudah terlibat dalam semua tahap mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, serta evaluasi. Melalui tipe partisipasi konsultatif, masyarakat sebagai masukan guna ditindaklanjuti pemerintah setempat, partisipasi fungsional dengan dibentuknya kelembagaan Pokdarwis, partisipasi insentif dengan keterlibatan masyarakat dalam buruh harian guna persiapan event, dan partisipasi mandiri

masyarakat lokal bebas melakukan kegiatan ekonomi di sekitar objek wisata. Bentuk partisipasi masyarakat berupa ide pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi, serta tenaga dan keterampilan pada tahap pelaksanaan.

Adapun faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata diantaranya sulitnya akses, keterbatasan anggota, pembagian penanggung jawab yang belum jelas, kurangnya kesiapan sumber daya manusia terkait ilmu teknologi, dan keterbatasan dana. Hal tersebut berdampak pada operasional objek wisata ini seperti kegiatan promosi berbasis sosial media, pemeliharaan fasilitas serta keamanan objek tersebut. Adapun faktor pendukung diantaranya kerja sama yang tinggi, kerja sama dengan berbagai pihak, daya tarik alam yang luar biasa, serta masyarakat yang memiliki keterampilan dalam memainkan budaya lokal.

Konsep pengembangan dan pengelolaan berbasis masyarakat yang diterapkan dalam pengembangan objek wisata ini yaitu dimensi ekonomi dengan adanya pendanaan secara berkala, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta *join venture*. Dimensi sosial yang di terapkan adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap aspek, meningkatkan kebanggaan komunitas, serta membagi peran yang adil. Namun pada indikator meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan penguatan komunitas masih belum tercapai. Dimensi Budaya diantaranya adanya event kebudayaan lokal, adanya upaya melestarikan budaya lokal, pertukaran budaya serta menghargai perbedaan dan martabat manusia. Dimensi lingkungan adanya *crayying capacity* area dan adanya upaya melakukan konservasi lingkungan seperti piket bersama, adanya himbauan kepada wisatawan guna melestarikan lingkungan., serta adanya program tanam pohon. Selanjutnya dimensi politik yaitu Meningkatkan kekuasaan komunitas lokal ,menjamin hak-hak masyarakat dalam menggunakan SDA namun untuk indikator peningkatan partisipasi belum tercapai. Dalam pengelolaan objek wisata ini menggunakan prinsip sapta pesona diantaranya aman, tertib, bersih, indah, ramah, dan kenangan, namun dalam hal ini masih terhambat oleh akses, fasilitas dan promosi berbasis sosial media sehingga berdampak pada keteraturan layanan dan infrastruktur pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, I. Nyoman Sukma. 2016. *Pariwisata Berkelanjutan*. Bali: Sustain-press.
- Arum, Dhiany Sukma, Dwiningtyas Padmaningrum, and Joko Winarno. 2022. "Kajian Dimensi Community-Based Tourism Dalam Pengembangan Desa Wisata Sumberbulu." *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension* 46(1):45–55.

- Daniswara, N. (2024). Pembangunan Wilayah Secara Endogen Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Potensi Desa Wisata. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 4(1), 78-93.
- Febrianti, Diana. 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Jurang Senggani di Desa Nglurup Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Selama Masa Pandemi Covid 19*. Repository Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharina, Kusmayra Ambarwati, Resty Nofilidaputri, Nuryami, and Lukman Waris. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hajar, Siti, Irwan Syari Tanjung, Yurisna Tanjung, and Zulfahmi. 2018. *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Irfani, Mohammad & Satlita, Lena. 2024. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. 09(2):1–32.
- El Lagarensen, Bet, Merry Adrah, and Chrisye M Katulung. 2023. “Swot Di Pulau Makalehi Kabupaten Sitaro.” *Jurnal Ilmu Pariwisata* 2(2):139–47.
- Maharani, T. S., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Peran Pokdarwis Dewi Arum Pulosari dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Wisata Pandean Berbasis Bisnis Kreatif. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4581-4587.
- Meleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tulungagung Tahun 2017-2027
- Potjana, Suansri. 1997. *Community Based Tourism Handbook: REST Project*. Thailand: REST Project.
- Rahim, Firmansyah. 2012. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: t.p.
- Satrio, D., & Sabana, C. (2018). Pengembangan *Community Based Tourism* Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 32(1), 31-43.
- Sarudin, Rendy. 2023. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Saungkuriang Kota Tangerang. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 6(1):220–28.
- Suaib. 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu: Penerbit Adab.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan